The background features a complex geometric design with overlapping triangles and polygons in various shades of blue (from light to dark) and white. The shapes are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, with some areas appearing to recede into the distance while others come forward.

EXECUTIVE SUMMARY

Table of Contents

| | |
|---|---|
| Table of Contents | 2 |
| Epdeskel Sebagai Sumber data E-Prodeskel | 3 |
| Tentang E-Prodeskel | 3 |
| Prodeskel Sebagai Sumber data E-Prodeskel | 3 |
| Klasifikasi Berdasarkan Prodeskel | 5 |
| Klasifikasi Berdasarkan Epdeskel | 7 |

Tentang E-Prodeskel

E-Prodeskel merupakan dashboard yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang digunakan sebagai media untuk menyajikan data yang telah dikumpulkan melalui aplikasi profil desa dan kelurahan (prodeskel) serta aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa (Epdeskel). Dashboard ini di desain guna memenuhi kebutuhan bagi analisa data maupun sebagai media berbagi data bagi pihak di dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri maupun diluar Kementerian Dalam Negeri.

Selain untuk kegunaan analisa dan berbagi data di dalam e-prodeskel juga disediakan menu yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah di dalam melakukan verifikasi data yang telah dihimpun di dalam Prodeskel maupun Epdeskel. Pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi data yang telah ada , melakukan verifikasi data dan selanjutnya dilakukan pembuatan berita acara dari setiap data yang telah diverifikasi. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan data yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan dengan baik

Saat ini E-Prodeskel juga telah melakukan integrasi dengan data SISKEUDES yang merupakan platform yang digunakan oleh pemerintah desa di dalam melaporkan perencanaan serta penganggaran keungan desa. Dengan integrasi yang telah dibangun saat ini pengguna dapat memanfaatkan serta memantau pelaksanaan penganggaran di tingkat desa.

Kerjasama selanjutnya telah dikembangkan bersama Ditjen Aptika KOMINFO. Kerjasama yang dilakukan dengan mengembangkan aplikasi desa yang merupakan suatu aplikasi yang disediakan oleh pemerintah yang terdiri dari gabungan antara SIDEKA NG, Prodeskel, Sipades serta SISKEUDES. Aplikasi desa diharapkan akan mempermudah transformasi digital desa.

Prodeskel Sebagai Sumber data E-Prodeskel

Salah satu sumberdata utama dari e-prodeskel adalah profil desa dan kelurahan yang diambil melalui aplikasi Prodeskel. Prodeskel adalah Sistem Informasi yang dijadikan rujukan untuk pembangunan desa dan kelurahan dan semua aspek pembangunan yang ada di desa dan kelurahaan. Prodeskel merupakan implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2007 tentang tentang Pedoman penyusunan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan.

Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa

dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan. Permendagri 12 tahun 2007 yang merupakan dasar bagi penyelenggaraan profil desa dan kelurahan mengatur hal yang terkait dengan proses penyusunan dan pendayagunaan profil desa. Penyusunan diartikan sebagai proses kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, data potensi desa dan kelurahan serta tingkat perkembangan desa dan kelurahan. Sedangkan aplikasi profil desa dan kelurahan digunakan untuk menunjang proses penyusunan tersebut sehingga data yang ada dapat mudah terkumpul dan terpublikasikan selain akan memudahkan pendayagunaan data yang telah ada dengan menyajikan berbagai analisa yang tidak hanya digunakan sebagai analisa per desa dan kelurahan namun juga antar desa dan kelurahan.

Epdeskel Sebagai Sumber data E-Prodeskel

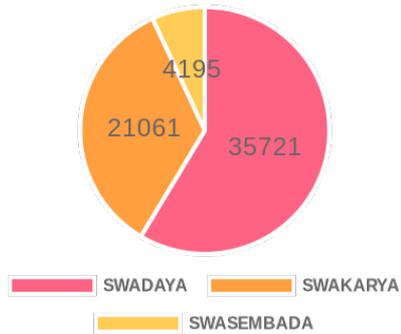
Salah satu tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa adalah melakukan evaluasi terhadap perkembangan desa. Untuk menunjang kegiatan evaluasi tersebut pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan peraturan menteri dalam negeri no 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menunjang tugas dan fungsi terkait dengan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan maka Ditjen Bina Pemerintahan desa mengeluarkan suatu produk aplikasi yang dikenal dengan Epdeskel. Epdeskel yang didasari permendagri 81 tahun 2015 berfungsi untuk melakukan penghimpunan data terkait dengan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan juga merupakan perangkat yang digunakan untuk memberikan dukungan atas kegiatan lomba desa dan kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan skema berjenjang dari tingkat desa hingga pusat.

Klasifikasi Berdasarkan Prodeskel

Prodeskel berfungsi sebagai aplikasi yang menghitung nilai klasifikasi desa dan kelurahan berdasarkan beberapa aspek secara harian. Berdasarkan hasil penilaian oleh aplikasi prodeskel pada tanggal 2024/05/06 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut dibawah.

Persentase Klasifikasi Berdasarkan Prodeskel



| Regional | Swadaya | Swakarya | Swasembada |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 12,616 | 4,326 | 900 |
| 2 | 11,632 | 11,607 | 2,429 |
| 3 | 8,665 | 4,758 | 748 |
| 4 | 2,808 | 370 | 118 |
| Total | 35,722 | 21,061 | 4,195 |

Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat klasifikasi desa masih di dominasi oleh desa dengan klasifikasi swadaya yaitu sebanyak 35,721 atau sebesar 43% dari total desa dan kelurahan kemudian diikuti klasifikasi swakarya sebanyak 21,061 atau sebesar 25% dari total desa dan kelurahan dan swasembada sebanyak 4,195 atau sebesar 5% dari total desa dan kelurahan. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 27% belum teridentifikasi karena belum melakukan penginputan data.

Untuk regional I yaitu desa dan kelurahan di pulau sumatera klasifikasi desa masih di dominasi oleh desa dengan klasifikasi swadaya yaitu sebanyak 1 atau sebesar 0% dari total desa dan kelurahan di regional I kemudian diikuti klasifikasi swadaya sebanyak 12,616 atau sebesar 50% dari total desa dan kelurahan di regional I dan swakarya sebanyak 4,326 atau sebesar 17% dari total desa dan kelurahan di regional I. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 33% belum teridentifikasi karena belum melakukan penginputan data.

Untuk regional II yaitu desa dan kelurahan di pulau Jawa dan Bali klasifikasi desa masih di dominasi oleh desa dengan klasifikasi swasembada yaitu sebanyak 900 atau sebesar 3% dari total desa dan kelurahan di regional II kemudian diikuti klasifikasi swadaya sebanyak 11,632 atau sebesar 45% dari total desa dan kelurahan di regional II dan swakarya sebanyak 11,607 atau sebesar 45% dari total desa dan kelurahan di regional II. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 7% belum teridentifikasi karena

belum melakukan penginputan data.

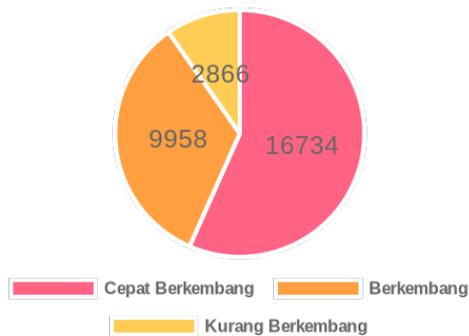
Untuk regional III yaitu desa dan kelurahan di pulau Kalimantan dan Sulawesi klasifikasi desa masih di dominasi oleh desa dengan klasifikasi swasembada yaitu sebanyak 2,429 atau sebesar 14% dari total desa dan kelurahan di regional III kemudian diikuti klasifikasi swadaya sebanyak 8,665 atau sebesar 49% dari total desa dan kelurahan di regional III dan swakarya sebanyak 4,758 atau sebesar 27% dari total desa dan kelurahan di regional III. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 11% belum teridentifikasi karena belum melakukan penginputan data.

Untuk regional IV yaitu desa dan kelurahan di pulau Maluku dan Papua klasifikasi desa masih di dominasi oleh desa dengan klasifikasi swasembada yaitu sebanyak 748 atau sebesar 5% dari total desa dan kelurahan di regional IV kemudian diikuti klasifikasi swadaya sebanyak 2,808 atau sebesar 20% dari total desa dan kelurahan di regional IV dan swakarya sebanyak 370 atau sebesar 3% dari total desa dan kelurahan di regional IV. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 73% belum teridentifikasi karena belum melakukan penginputan data.

Klasifikasi Berdasarkan Epdeskel

Epdeskel berfungsi sebagai aplikasi yang menghitung nilai klasifikasi perkembangan desa dan kelurahan berdasarkan hasil perhitungan instrumen penilaian diri secara harian. Berdasarkan hasil penilaian oleh aplikasi Epdeskel pada tanggal 2024/05/06 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut dibawah.

Persentase Klasifikasi Perkembangan Berdasarkan Epdeskel



| Regional | Kurang Berkembang | Berkembang | Cepat Berkembang |
|--------------|-------------------|--------------|------------------|
| 1 | 771 | 2,181 | 2,799 |
| 2 | 1,264 | 4,653 | 11,026 |
| 3 | 752 | 2,932 | 2,617 |
| 4 | 79 | 191 | 292 |
| Total | 2,866 | 9,957 | 16,734 |

Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat klasifikasi desa masih di dominasi oleh desa dengan klasifikasi cepat berkembang yaitu sebanyak 16,734 atau sebesar 20% dari total desa dan kelurahan kemudian diikuti klasifikasi berkembang sebanyak 9,958 atau sebesar 12% dari total desa dan kelurahan dan kurang berkembang sebanyak 2,866 atau sebesar 3% dari total desa dan kelurahan. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 65% belum teridentifikasi karena belum melakukan penginputan data.

Untuk regional I yaitu desa dan kelurahan di pulau sumatera klasifikasi desa masih di dominasi oleh desa dengan klasifikasi cepat berkembang yaitu sebanyak 2,799 atau sebesar 11% dari total desa dan kelurahan di regional I kemudian diikuti klasifikasi berkembang sebanyak 2,181 atau sebesar 9% dari total desa dan kelurahan di regional I dan kurang berkembang sebanyak 771 atau sebesar 3% dari total desa dan kelurahan di regional I. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 77% belum teridentifikasi karena belum melakukan penginputan data.

Untuk regional II yaitu desa dan kelurahan di pulau Jawa dan Bali klasifikasi desa masih di dominasi oleh desa dengan klasifikasi cepat berkembang yaitu sebanyak 11,026 atau sebesar 42% dari total desa dan kelurahan di regional II kemudian diikuti klasifikasi berkembang sebanyak 4,653 atau sebesar 18% dari total desa dan kelurahan di regional II dan kurang berkembang sebanyak 1,264 atau sebesar 5% dari total desa dan kelurahan di regional II. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 35% belum

teridentifikasi karena belum melakukan penginputan data.

Untuk regional III yaitu desa dan kelurahan di pulau Kalimantan dan Sulawesi klasifikasi desa masih di dominasi oleh desa dengan klasifikasi berkembang yaitu sebanyak 2,932 atau sebesar 16% dari total desa dan kelurahan di regional III kemudian diikuti klasifikasi cepat berkembang sebanyak 2,617 atau sebesar 15% dari total desa dan kelurahan di regional III dan kurang berkembang sebanyak 752 atau sebesar 4% dari total desa dan kelurahan di regional III. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 65% belum teridentifikasi karena belum melakukan penginputan data.

Untuk regional IV yaitu desa dan kelurahan di pulau Maluku dan Papua klasifikasi desa masih di dominasi oleh desa dengan klasifikasi cepat berkembang yaitu sebanyak 292 atau sebesar 2% dari total desa dan kelurahan di regional IV kemudian diikuti klasifikasi berkembang sebanyak 191 atau sebesar 1% dari total desa dan kelurahan di regional IV dan kurang berkembang sebanyak 79 atau sebesar 1% dari total desa dan kelurahan di regional IV. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 96% belum teridentifikasi karena belum melakukan penginputan data.